

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kunci kemenangan suatu negara dalam kompetisi di era global adalah pada kemampuannya mengelola dan memberdayakan SDM dalam menguasai sains dan teknologi (Ali, Mohammad, 2009 : 53). Hal ini sesuai dengan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang menjelaskan bahwa kemampuan bangsa yang berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Peningkatan kemampuan perekonomian suatu bangsa sangat tergantung diantaranya kepada kemampuan sumber daya manusia yang menjadi komponen pokok sebagai makhluk yang berperan aktif dalam perubahan melalui tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya (Elchanan Cohn : 1979; Ace Suryadi, 2009). Aset paling berharga bagi suatu bangsa pada era global ini menurut Theodore Schultz dalam Jac Fitz-enz (2000) adalah sains dan pekerja terdidik (*knowledge worker*). Pengetahuan (*knowledge*) telah menjadi modal bagi pembangunan ekonomi suatu negara menggantikan sumber daya alam yang tidak dapat menjadi andalan karena dapat terdepresiasi dan habis.

Muchlas Samani (1998) mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia (*World Bank*) tahun 1995 terhadap 150 negara di seluruh dunia menyimpulkan bahwa kekuatan dan kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh empat komponen pokok yang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa tersebut. Komponen tersebut adalah inovasi (*innovation*) memberikan kontribusi sebesar 45%, jejaring

kerjasama (*networking*) berkontribusi sebesar 25%, teknologi (*technology*) berkontribusi 20%, sementara sumber daya alam (*natural resources*) hanya berkontribusi sebesar 10%. Dari hasil penelitian ini jelas bahwa sumberdaya alam tidak memberikan sumbangan yang berarti bila tidak dikelola oleh sumberdaya manusia yang inovatif dan memiliki jaringan yang kuat dalam mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Sehingga orientasi pembangunan pendidikan menjadi landasan penting bagi pengembangan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia yang merupakan aset paling berharga suatu bangsa dalam menghadapi tantangan era global (Richard D. Lakes, 2008).

Bagi Bangsa Indonesia globalisasi dan industrialisasi merupakan sebuah tantangan dan peluang yang harus dapat dimanfaatkan untuk dapat hidup sejajar dan berdampingan dengan masyarakat dunia lainnya. Globalisasi dan industrialisasi di satu sisi membuka peluang untuk mempercepat laju pembangunan, tetapi di sisi lain membawa tantangan persaingan yang semakin ketat dan tajam. Tuntutan di era global adalah "keunggulan kompetitif (*competitf advantage*)" atas semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh industri nasional. Sehingga secara simultan telah menjadikan sumber daya manusia menjadi "*kekuatan utama*" bagi industri nasional dalam menghasilkan keunggulan dalam konteks yang lebih komprehensif, dan inovatif.

Pendidikan merupakan sektor paling strategis dalam pembangunan nasional, hal ini disebabkan karena peningkatan kualitas manusia yang menjadi subyek pembangunan hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan

berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat. Dalam perspektif global pendidikan berperan dalam : 1) pengembangan diri peserta didik (*personal development*), 2) pengembangan ketrampilan kerja (*employability or work skills development*), 3) pengembangan kewarganegaraan (*citizenship*), dan 4) transmisi dan transformasi budaya (*transmission and transformation culture*).

Pendidikan yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah pendidikan yang berorientasi pada dunia industri dengan penekanan pada pendekatan pembelajaran dan didukung oleh kurikulum yang sesuai. Dunia industri yang merupakan sasaran dari proses dan hasil pembelajaran sekolah kejuruan mempunyai karakter dan nuansa tersendiri. Oleh karena itu sekolah kejuruan dalam proses pembelajaran harus bisa membuat pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Untuk menghadapi hal tersebut, Pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan kejuruan dituntut mampu menyiapkan tenaga kerja terampil yang dapat mengisi keperluan pembangunan, mengubah status siswa dari status beban menjadi aset bangsa, menciptakan sumberdaya manusia profesional yang dapat diandalkan dan unggul menghadapi persaingan global.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pendidikan kejuruan adalah merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Ditegaskan pula dalam kurikulum SMK (2004) bahwa peran SMK adalah menyiapkan siswa dengan kemampuan dan keterampilan bidang tertentu agar setelah lulus dapat bekerja pada bidang tertentu baik secara

mandiri (wiraswasta) maupun untuk mengisi lowongan yang ada. Sesuai dengan pernyataan diatas, maka lulusan SMK dituntut harus mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya. Keberhasilan SMK dalam menyelenggarakan pendidikannya tidak dapat diukur dari jumlah siswa yang lulus maupun berprestasi, akan tetapi seberapa besar lulusan SMK tersebut dapat tersalurkan untuk mengisi dunia kerja.

Bagi lembaga pendidikan kejuruan mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah salah satu kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang siap untuk diterjunkan ke dunia pekerjaan. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan kejuruan harus memprioritaskan pengembangan sistem pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan yang benar-benar profesional, memiliki etos kerja, disiplin dan tetap menjunjung tinggi budaya bangsa.

Berbagai pihak mengatakan bahwa program yang dilaksanakan di SMK belum sesuai dengan kondisi nyata di dunia kerja, belum mencapai kompetensi yang diharapkan, sehingga banyak menyebabkan terjadinya pengangguran. Ketidaksesuaian (*mismatch*) ini telah menjadi isu utama yang menyebabkan polemik berkepanjangan antara dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan. Direktorat Pembinaan SMK Ditjenmandikdasmen Kemendiknas telah melakukan beberapa upaya dalam memperbaiki mutu pendidikan menengah kejuruan dengan melakukan penambahan pembangunan fasilitas fisik bangunan, pengadaan peralatan praktik, pengadaan dan penataran guru, dan peningkatan pengembangan kurikulum.

Sebenarnya upaya dan tekad Bangsa Indonesia khususnya pemerintah dalam membangun pendidikan kejuruan telah ditunjukkan sejak Pelita I hingga akhir Pelita VI, dengan investasi besar-besaran membangun sekolah baru, rehabilitasi, pengadaan peralatan praktik, peningkatan mutu guru dan lain-lain. Kemudian tersendat sejak bergulirnya otonomi daerah tahun 2001, dengan semakin sulitnya mendapatkan pendanaan dalam pengembangan sekolah kejuruan. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan kejuruan dalam kurun waktu 25 tahun telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 6 (enam) kali, baik secara makro maupun mikro.

Salah satu bentuk kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan yang cukup menonjol adalah pada masa Kabinet Pembangunan VI, Menteri Pendidikan Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro memperkenalkan kebijakan "*link and match*". Kebijakan ini mengimplikasikan wawasan sumber daya, mutu, keunggulan, profesionalisme dan ekonomi dalam pendidikan kejuruan. Sehingga menghasilkan suatu model pendidikan kejuruan yang kita kenal dengan pendidikan sistem ganda (PSG), sebagai sebuah bentuk penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program belajar melalui kegiatan bekerja langsung pada bidang pekerjaan yang relevan, terarah untuk mencapai penguasaan kemampuan tertentu (Dedi Supriadi, 2002:242).

Untuk mendukung keberhasilan program pendidikan kejuruan model PSG, maka dibentuklah majelis pendidikan kejuruan baik tingkat nasional (MPKN), propinsi (MPKP) maupun majelis sekolah (MS). Sosialisasi ini bertujuan untuk

meningkatkan citra pendidikan kejuruan dan mengajak serta dunia industri agar berperan dalam PSG. Pada masa ini dikembangkan pula konsepsi pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (*competence base curriculum*), luas, kuat dan mendasar (*broad base curriculum*), dengan dukungan dunia industri dan dunia usaha yang mulai melembaga.

Salah satu capaian dalam program ini adalah keluarnya SKB Mendikbud dan Ketua Umum Kadin Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1994 No. 0267a/U/1994 dan No. 84/KU/X/1994. Kehadiran MPKN telah secara efektif menggerakkan berbagai badan, organisasi, perusahaan dan asosiasi profesi dalam mendukung PSG, sementara di tingkat mikro (sekolah) dalam majelis sekolah (MS) industri yang terlibat telah berperan aktif sebagai mitra SMK dalam keseluruhan kegiatan SMK.

Perkembangan penyelenggaraan pendidikan kejuruan hingga saat ini telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Akan tetapi, harus diakui bahwa dalam penyelenggaraannya program pendidikan kejuruan masih mengalami beberapa kendala, sehingga efektivitasnya masih diragukan, bahkan eksistensi pendidikan kejuruan sebagai salah satu jalur unggulan dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM masih dipertanyakan. Menurut Sumarno (2008) hingga saat ini pendidikan kejuruan masih menghadapi kendala kesepadanan kualitatif dan kuantitatif. Kesepadanan kualitatif terjadi karena perkembangan teknologi di industri yang sangat cepat sehingga terjadi kesenjangan kompetensi yang dimiliki lulusan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri,

sementara kesepadanan kuantitatif terjadi karena adanya ketidak seimbangan jumlah lapangan kerja yang ada dengan jumlah output pendidikan yang mencari pekerjaan.

Louis L Warren (2004) berpendapat bahwa beberapa masalah yang sering muncul ke permukaan antara lain, keterbatasan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh pendidikan kejuruan masih jauh ketinggalan dengan kondisi di industri. Hasil penelitian Sulipan (2004) berkesimpulan bahwa kesenjangan antara peralatan yang tersedia dan dimiliki oleh sekolah kejuruan dengan industri masih sangat lebar, selanjutnya Sulipan (2004) menyampaikan bahwa sekolah kejuruan belum mampu memberdayakan (*empowering*) semua potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungannya. Jika siswa hanya diberi kesempatan mengembangkan diri berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh sekolah, maka kualitas pemahaman siswa tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh karena kemampuan alat dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah sangat terbatas. Oleh karenanya direkomendasikan oleh Sulipan untuk mencapai kompetensi yang dharakan diperlukan kerjasama dengan pihak industri dalam rangka memberdayakan semua potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Bagi pendidikan kejuruan kerjasama yang dibangun dengan dunia industri merupakan suatu hal yang sangat tepat khususnya dalam mengembangkan *resources* (Lawrence C. Scharmann, 2007). Menurut Marilyn J, Amey, Pamela L, C. Casey Ozaki (2007), dengan adanya kerjasama antara pendidikan kejuruan dan industri diharapkan terdapat pemanfaatan fasilitas. Sementara menurut Trace Allen (2007) dan McLean (2004) kerjasama yang dibangun antara sekolah kejuruan dengan

industri memiliki manfaat yang cukup besar bagi kedua belah pihak khususnya sebagai *tools improvement*.

Dunia industri sebagai mitra harus dapat berjalan seiring dan berkembang bersama dunia pendidikan kejuruan. Oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Bentuk pendekatan yang bisa dilakukan antara dunia pendidikan kejuruan dengan dunia industri menurut Ian Smith (2006) berupa pendekatan kerjasama kemitraan. Senada dengan hal tersebut menurut Henrietta Bernal (2004) dan Susan Bodilly, *et. al* (2004) bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri dapat dikembangkan melalui kerangka komunitas yang terdapat disekitar lingkungan sekolah dalam rangka memanfaatkan dan memberdayakan semua potensi dan sumberdaya yang dimiliki di sekitar sekolah. Sebagai sebuah komunitas menurut Suzane R. Hawley (2007) dan Jason, Leonard, (1997 : 89), sekolah dan dunia usaha dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi bersama.

Berangkat dari beberapa permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu upaya dari lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk dapat bersama-sama mengembangkan pendidikan, agar tujuan dunia usaha dan lembaga pendidikan dapat tercapai dan selaras. Bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam mengembangkan dan menyelaraskan tujuan tersebut adalah menyelaraskan dan mengembangkan komunikasi yang berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan industri serta kebutuhan kompetensi industri agar dapat diselaraskan dengan program pendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK), sehingga siswa

memperoleh bekal yang cukup dan memadai untuk dapat bersaing pada dunia kerja, disamping dunia usaha mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan.

Pendidikan kejuruan harus mampu mengembangkan jejaring kerjasama dalam mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan pendidikan (Ori Eyal, 2008). *Networking* sangat penting artinya bagi keberlanjutan dan kemajuan suatu organisasi bahkan suatu bangsa. Kerjasama merupakan kebutuhan pokok bagi sekolah kejuruan untuk menindaklanjuti pembelajaran aspek produktif sebagai ciri khas sekolah kejuruan. Pengembangan jejaring kerjasama yang dijalin antara sekolah kejuruan dan dunia industri sangat memungkinkan bagi sekolah untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi siswa mendapat pembekalan ketrampilan produktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **B. Indikator Kelemahan Kinerja SMK di Yogyakarta**

Pendidikan kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang menyiapkan peserta didik yang berminat untuk dididik menjadi tenaga kerja bidang tertentu yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Pendidikan kejuruan yang efektif adalah pendidikan yang dapat menghasilkan kompetensi lulusan (peserta didik) yang sesuai dengan persyaratan bidang pekerjaan tertentu pada dunia kerja. Pendidikan kejuruan lebih menekankan pada misi yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja dimana penekanannya lebih pada aspek psikomotor, sementara pendidikan umum lebih menekankan pada aspek kognitif. Pada dasarnya pendidikan kejuruan ditujukan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja, oleh

karenanya pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mengaksentuasikan programnya pada program untuk memperoleh keterampilan kerja. Karena misinya yang khusus tersebut, maka kualifikasi lulusan pendidikan kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Dengan demikian, terdapat dua variabel yang saling berkaitan dalam pendidikan kejuruan yaitu variabel peserta didik dan bidang pekerjaan atau dunia kerja. Terdapat dua kemungkinan mengenai hubungan antara peserta didik dengan bidang pekerjaan yaitu: pertama, kompetensi peserta didik yang dihasilkan dari pendidikan kejuruan sesuai dengan persyaratan bidang pekerjaan (*match*), dan ke dua, kompetensi peserta didik tidak sesuai dengan persyaratan bidang pekerjaan (*mismatch*).

Berdasarkan data pada masing-masing SMK di Yogyakarta menunjukkan beberapa simpul permasalahan pengelolaan pendidikan dan kualitas lulusan SMK di Yogyakarta khususnya dalam capaian daya serap lulusan terhadap dunia industri. Dari sejumlah 26 (dua puluh enam) SMK yang terdapat di Yogyakarta dapat dibagi menjadi sebanyak 7 (tujuh) SMK negeri, sementara 19 (sembilan belas) lainnya swasta, dengan status rata-rata terakreditasi A, sementara masih terdapat 6 (enam) SMK dengan akreditasi B dan 1 (satu) SMK dengan akreditasi C, dengan tingkat pertumbuhan jumlah siswa mencapai 0,13% pertahun. Sementara dari data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta didapatkan informasi bahwa tingkat capaian siswa mengulang pada SMK tiap tahun mencapai 1,04%, dengan rata-rata siswa putus sekolah mencapai 0,75%. Sedangkan pencapaian kelulusan UAN pada SMK di

Yogyakarta mencapai 80,11% dengan hasil pencapaian NUAN rata-rata mencapai 6,42.

Sementara daya serap lulusan terhadap dunia industri rata-rata mencapai 72,7% untuk SMK Negeri dan 40,82% untuk SMK Swasta, dengan rata-rata lama tunggu sejak lulus SMK lebih dari 6 (enam) bulan. Disamping itu masih terdapat lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan sebanyak 21,96%, dan hanya sebesar 4,72% lulusan SMK yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Namun dari data SMK swasta didapatkan informasi bahwa rata-rata sebanyak 18,85% dari tiap angkatan lulusan SMK berwirausaha.

Data Nasional hingga saat ini menunjukkan daya serap lulusan sekolah kejuruan pada dunia industri masih cukup rendah, berdasarkan data BPS tahun 2008 disebutkan bahwa meskipun angka lowongan kerja masih jauh lebih rendah dari angka pencari kerja, namun pada kenyataannya tidak semua lowongan kerja terpenuhi penempatannya. Pada tahun 2007 tersedia 375,16 ribu pencari kerja terdaftar, dan 300,40 ribu lowongan kerja terdaftar, serta sebanyak 175,54 ribu tenaga kerja ditempatkan. Keadaan tersebut menunjukkan telah terjadinya mismatch dalam pasar kerja (BPS, 2009 : 62) Sementara di Yogyakarta terdapat 38,490 tenaga kerja terdaftar (pencari kerja), sementara jumlah lowongan kerja terdaftar hanya sebanyak 22,208 lowongan. Dari jumlah tersebut hanya sebesar 17,106 penempatan kerja. Selanjutnya menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta data Dinas Perindagkop DIY tahun 2008 rata-rata lama tunggu lulusan SLTA (SMK-SMA)

untuk mendapatkan pekerjaan adalah 0-2 tahun sebanyak 15.220 orang, 3-5 tahun 7.628 orang dan >5 tahun 8.505 orang (Kompas, 6 Maret 2010).

Berdasarkan data-data tersebut di atas dapat digambarkan besarnya angka pengangguran terdidik khususnya pada lulusan SLTA baik SMK maupun SMA dan besarnya lama tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, yang menunjukkan bahwa relevansi pendidikan yang diselenggarakan baik pada SMK maupun SMA belum mampu memenuhi kebutuhan dan kompetensi pekerjaan yang ada. Selanjutnya berdasarkan data pada Biro Pusat Statistik dapat digambarkan bahwa hampir terdapat 20% lowongan kerja yang tidak terisi, separuhnya adalah angkatan kerja berpendidikan sarjana dan ahli madya. Sementara angka pengangguran terbuka pada angkatan kerja berpendidikan menengah masih menunjukkan tren meningkat, sebagai gambaran pada tahun 2007 – 2008 peningkatan jumlah pengangguran berpendidikan menengah ke atas SMA/SMK dari 3.6 juta menjadi 3.9 juta atau sebesar  $\pm 7\%$ , pada pendidikan diploma/akademi dari 237.251 orang menjadi 322.836 orang atau meningkat sebesar 36%, pada pendidikan sarjana dari 348.107 orang menjadi 385.418 orang atau meningkat sebesar 11% (data BPS 2008 diolah), besarnya pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sehingga penyelesaiannya harus segera dipikirkan dan ditindak lanjuti dengan segera.

Bahkan secara tegas dalam Laporan Tren Ketenaga Kerjaan dan Sosial di Indonesia 2008, Organisasi Buruh Internasional (*ILO*) menyampaikan bahwa sebanyak 4.516.100 orang dari 9.427.600 orang pengangguran terbuka adalah lulusan SMA dan SMK (Kompas, 22 Agustus 2008). Berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) pada tabel 1. menunjukkan bahwa besarnya angka pengangguran tenaga kerja lulusan SLTA Kejuruan khususnya SMK yang memang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja disebabkan oleh rendahnya daya adaptasi lulusan sekolah (SMK) memenuhi tuntutan pasar kerja, sehingga fokus kompetensi dan keahlian lulusan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan.

Tabel 1. Pengangguran Menurut Pendidikan *(dalam ribu-an)*

| Tahun | Bulan    | Pendidikan                 |                           |         |         |             |                      |                  |                       | Jumlah   |
|-------|----------|----------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------|
|       |          | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Belum/Tidak Tamat Sekolah | SD      | SLTP    | SLTA (umum) | SLTA (kejuruan/ SMK) | Diploma/ Akademi | Sarjana / Universitas |          |
| 2003  |          | 325.5                      | 710.4                     | 2,495.9 | 2,458.9 | 2,435.8     | 1,037.1              | 202.8            | 245.9                 | 9,939.3  |
| 2004  |          | 336.0                      | 663.3                     | 2,275.3 | 2,690.9 | 2,441.2     | 1,254.3              | 237.3            | 348.1                 | 10,251.4 |
| 2005  | Februari | 342.7                      | 670.1                     | 2,541.0 | 2,680.8 | 2,680.8     | 1,230.8              | 322.8            | 385.4                 | 10,854.3 |
|       | November | 264.5                      | 673.5                     | 2,729.9 | 3,151.2 | 3,069.3     | 2,037.6              | 308.5            | 395.5                 | 11,899.3 |
| 2006  | Februari | 234.5                      | 615.0                     | 2,675.5 | 2,860.0 | 2,842.9     | 1,204.1              | 297.2            | 375.6                 | 11,104.7 |
|       | November | 170.7                      | 611.3                     | 2,589.7 | 2,730.0 | 2,851.5     | 1,305.2              | 278.1            | 395.6                 | 10,932.0 |
| 2007  | Februari | 145.8                      | 520.3                     | 2,753.5 | 2,643.1 | 2,630.4     | 1,114.7              | 330.3            | 409.9                 | 10,547.9 |
|       | November | 94.3                       | 438.6                     | 2,179.8 | 2,264.2 | 2,532.2     | 1,538.3              | 397.2            | 566.6                 | 10,011.1 |
| 2008  | Februari | 79.8                       | 448.4                     | 2,216.7 | 2,166.6 | 2,204.4     | 1,165.6              | 519.9            | 626.2                 | 9,427.6  |

Sumber : BPS : 2008 (diolah)

Bertolak dari uraian diatas, pendidikan kejuruan harus segera dapat mereposisi dan memperbaiki kualitasnya terutama memperkuat dasar konsepnya agar dapat berkembang lebih baik. Reposisi ini ditujukan untuk menata ulang sistem pendidikan kejuruan agar menjadi sistem pendidikan yang *permeable dan flexible*, dengan pola pembelajarannya yang berbasis kompetensi, disamping itu, juga untuk menata ulang bidang atau program keahlian yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan kejuruan pasca reformasi, misalnya adalah berubahnya orientasi pendidikan kejuruan yang dikembangkan dari yang bersifat *supply driven* menjadi *demand driven*. Sistem pengelolaan yang tadinya

bersifat sentralistik, berubah menjadi desentralisasi. Pendekatan pembelajarannya pun bergeser, dari pendekatan mata pelajaran menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pun berkembang dari yang semula sangat terstruktur, menjadi lebih luwes (*flexible*) dan terbuka (*permeable*).

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa masih terdapat kesenjangan antara harapan dan capaian SMK khususnya dalam menghasilkan lulusan yang diharapkan mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana harapan dunia kerja. Sehingga harapan masyarakat pada sekolah kejuruan (SMK) sebagai sebuah investasi dalam menghasilkan tenaga kerja yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti hingga saat ini masih menjadi polemik, bahkan belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah kejuruan adalah keterbatasan para pengelola dalam menguasai masalah, sarana dan fasilitas dan mengintegrasikannya dalam kebijakan pengembangan pendidikan. Lebih lanjut hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan dan keraguan dunia kerja terhadap penguasaan teknologi serta minimnya kemampuan praktik yang dimiliki oleh lulusan SMK selama studi di sekolah.

Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya adalah pendidikan kejuruan masih menghadapi kendala kesepadanan kualitatif dan kuantitatif yang disebabkan oleh ketidakmampuan SMK dalam mengikuti perkembangan teknologi dan ketidak

sesuaian kemampuan dan kompetensi lulusan SMK yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja dimana hanya 50% (17,106) lulusan SMK yang mampu ditempatkan sementara lowongan yang tersedia sebanyak 38,490 lowongan. Hal ini disebabkan oleh ketidak sesuaian antara *demand* dengan *supply* yang tersedia, karena kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja tidak mampu dipenuhi oleh lulusan SMK. Disamping itu masih tingginya waktu tunggu SMK untuk mendapatkan pekerjaan adalah 0-2 tahun sebanyak 15.220 orang, 3-5 tahun 7.628 orang dan >5 tahun sebanyak 8.505 orang.

Beberapa permasalahan yang menyertai ketidak sesuaian (*mismatch*) lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja diantaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi dunia kerja (Sugiono, 2003), kelemahan kepemimpinan pendidikan kejuruan dalam pengelolaan program pendidikan dan pengembangan kebijakan program peningkatan mutu SMK, khususnya terkait dengan visi, misi, dan profesionalisme, selanjutnya implementasi program dan evaluasi program pengembangan mutu pendidikan yang belum optimal (Basuki Wibawa, 2005:63).

Seharusnya permasalahan tersebut dapat diminimalisir melalui kerjasama sinergis antara SMK dengan dunia kerja, sehingga perlu adanya suatu upaya dari lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk dapat bersama-sama mengembangkan pendidikan. Bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri adalah menyelaraskan dan mengembangkan komunikasi yang berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan industri serta kebutuhan kompetensi industri agar dapat diselaraskan dengan program pendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK).

Namun program yang dilaksanakan di SMK belum sesuai dengan kondisi nyata di dunia kerja.

Kemampuan pengembangan kerjasama kemitraan antar pihak sekolah (SMK) dengan dunia usaha yang diupayakan melalui aspek manajemen akan lebih menjamin terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu melalui manajemen kolaborasi yang baik, maka kontinuitas pendidikan akan tetap terjaga dan akan membawa pelaksanaan yang lebih profesional. Dengan kontinuitas pendidikan yang stabil, maka pelatihan ketrampilan kejuruan siswa yang dilakukan di sekolah dapat berkesinambungan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan oleh dunia kerja.

Mengingat kompleksnya permasalahan yang ada pada SMK sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini difokuskan pada masalah pengembangan dan implementasi manajemen stratejik pengembangan mutu SMK berbasis kemitraan (*colaboration partnership*) dengan dunia usaha (dunia industri) yang meliputi aspek-aspek : (1) analisis kekuatan dan kelemahan institusional; (2) pengenalan partner; (3) perencanaan kerjasama; (4) organisasi kerjasama; (5) implementasi kerjasama; (6) dan evaluasi kerjasama.

Upaya ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan guna meningkatkan mutu lulusan SMK. Aspek yang diteliti dalam pengembangan kerjasama yang dikaitkan dengan upaya peningkatan relevansi pendidikan di SMK adalah aspek manajemen strategik dalam pengembangan kerjasama kemitraan yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan. Pemfokusan ini didasari oleh alasan

bahwa: 1) Aspek manajemen merupakan unsur penting yang lebih menjamin terhadap keberhasilan penyelenggaraan kerjasama, yang pada akhirnya akan mengacu pada upaya pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh komunitas sekolah dalam kerangka kerjasama kemitraan antara SMK dengan dunia kerja; 2) Melalui aspek manajemen yang di dalamnya menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, aspek ketrampilan kejuruan siswa dapat ditingkatkan sehingga lulusan SMK menjadi lebih relevan dengan dunia kerja.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang timbul pada pendidikan menengah kejuruan (SMK) yang berhubungan dengan mutu dan relevansi SMK yang rendah, hal ini berkaitan dengan upaya dan strategi manajemen (*administrator*) sekolah dalam melakukan pengelolaan potensi dan sumber daya untuk mencapai tujuan dapat dirangkum menjadi suatu permasalahan pokok yang akan diteliti yaitu :

1. Apakah kebijakan program peningkatan mutu SMK berbasis kemitraan di Kota Yogyakarta yang telah dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja
  - a. Apakah bentuk program kegiatan yang telah dibuat dalam rangka kerjasama dengan dunia kerja sebagai upaya untuk meningkatkan mutu SMK
  - b. Apakah kebijakan dan rencana program kerjasama SMK dengan dunia kerja telah sesuai dengan misi dan visi sekolah
  - c. Apakah semua *stakeholder* telah memahami kebijakan dan rencana program kerjasama SMK dengan dunia kerja
2. Bagaimanakah implementasi program peningkatan mutu SMK berbasis kemitraan di Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja

- a. Apakah kendala yang dihadapi sekolah dalam kerjasama dengan *stakeholder* selama ini khususnya dengan industri
  - b. Apakah struktur dan fungsi organisasi kerjasama SMK dengan dunia kerja sudah tepat dalam melaksanakan visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan
  - c. Apakah kompetensi SDM dalam team teknis kerjasama telah mendukung implementasi kerjasama
  - d. Bagaimanakah komitmen masing-masing pihak dalam kerjasama telah mendukung implementasi program kerjasama
3. Bagaimana efektivitas pengendalian program peningkatan mutu SMK di Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja
- a. Apakah strategi pengendalian program kerjasama yang telah dilaksanakan antara sekolah dengan dunia kerja
  - b. Bagaimanakah hasil pengendalian program kerjasama antara SMK dengan dunia kerja
  - c. Apakah umpan balik yang diberikan oleh mitra kerja (dunia kerja) terhadap hasil evaluasi kerjasama antara SMK dengan dunia kerja
4. Bagaimanakah efektivitas implementasi program peningkatan mutu SMK di Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja
- a. Bagaimanakah efektifitas kerjasama antara sekolah dengan *stakeholder* selama ini khususnya dengan industri
  - b. Apakah manfaat kerjasama antara sekolah dengan *stakeholder* selama ini khususnya dengan industri dalam pengembangan sekolah
  - c. Apakah SMK dapat meningkatkan kinerjanya melalui kerjasama dengan dunia kerja
5. Bagaimanakah model konseptual peningkatan mutu SMK berbasis kemitraan antara sekolah dengan *stakeholder* khususnya dengan industri dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama kemitraan (*colaboration partnership*) antara SMK dengan *stakeholder* atau dunia industri dan jasa pada SMK kelompok teknologi khususnya yang memiliki jurusan teknik mekanik otomotif yang secara spesifik tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan program peningkatan mutu SMK berbasis kemitraan di Kota Yogyakarta yang telah dibuat untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja
2. Untuk mengetahui implementasi program peningkatan mutu SMK berbasis kemitraan di Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja
3. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian program peningkatan mutu SMK di Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja
4. Untuk mengetahui efektivitas implementasi program peningkatan mutu SMK di Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja
5. Menemukan alternatif model konseptual peningkatan mutu SMK berbasis kemitraan dengan *stakeholder* khususnya dengan industri dalam upaya memenuhi kebutuhan dunia kerja

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam tujuan penelitian ini, maka temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut :

## 1. Secara Teoritik

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan khasanah dan wawasan keilmuan khususnya dalam pengembangan manajemen sekolah berbasis kerjasama dengan industri atau *stakeholder* terkait dalam rangka menyeleraskan tujuan pendidikan dengan kebutuhan industri
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian dan pengembangan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau dunia industri

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam rangka mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja sesuai dengan perkembangan dunia kerja
- b. Bagi guru sekolah menengah kejuruan (SMK) penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi, inspirasi dan media refleksi dalam mengembangkan metode pengajaran khususnya dalam PBM yang sesuai dengan perkembangan industri
- c. Bagi sekolah menengah kejuruan (SMK) penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan rujukan dalam mengembangkan jejaring (*networking*) kerjasama dengan industri dalam pengembangan sekolah agar relevan dengan tuntutan dan perkembangan industri
- d. Bagi orang tua dan masyarakat secara umum penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan jejaring (*networking*) kerjasama antara sekolah dan industri serta menjadi *benchmarking* dalam memilih sekolah bagi putra-putrinya.

- e. Bagi industri penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam mengembangkan kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memenuhi sumberdaya manusia yang diharapkan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi
- f. Bagi dinas pendidikan atau pemerintah penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dalam kebijakan pengembangan SMK dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dunia kerja.

### **G. Kerangka Pikir Penelitian**

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan dari seni dan budaya Manusia yang dinamis dan syarat akan perkembangan, karena itu perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus menerus di lakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyempurnaan atau perbaikan pendidikan harus dapat mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan, sehingga perlu terus menerus dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mutu lulusan Pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, alat bantu dan bahan, manajemen, sekolah, lingkungan sekolah dan lapangan latihan kerja siswa.

Persoalan relevansi hingga saat ini menjadi isu yang cukup hangat, .secara lebih spesifik, persoalan relevansi yang berkaitan dengan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Konteks relevansi dalam komunikasi digunakan sebagai sebuah ukuran (measurement), dimana ukuran ini dikenakan kepada sebuah kinerja sistem. Dengan kata lain, ukuran ini biasanya datang dari sisi luar sebuah sistem, sebab itu dapat pula disebut sebagai ukuran eksternal. Secara konseptual, ukuran relevansi eksternal memiliki kelemahan. Dalam konsep relevansi, sebuah program pendidikan dianggap relevan jika sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kesesuaian ini kemudian ditetapkan sebagai sebuah ukuran kuantitatif yang tetap.

Relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan (Muhammad Ali, 2009 : 300). Sehingga relevansi adalah kesesuaian antara proses dan materi yang diberikan dalam pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Atau bila dikaitkan dengan istilah lain merupakan keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*) antara pendidikan dan permintaan pasar. Indikator relevansi adalah kesepadanan dan kesetaraan antara pendidikan dan permintaan pasar, berarti bahwa kesesuaian antara permintaan pasar dengan apa yang diselenggarakan oleh pendidikan pada lembaga pendidikan formal yang mencakup pemberian kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh lulusan, sehingga kemampuan tersebut dapat digunakan dalam bekerja. Kesetaraan pendidikan menunjukkan tingkat penguasaan kemampuan tersebut sesuai dengan tingkat penguasaan yang diminta untuk melaksanakan pekerjaan.

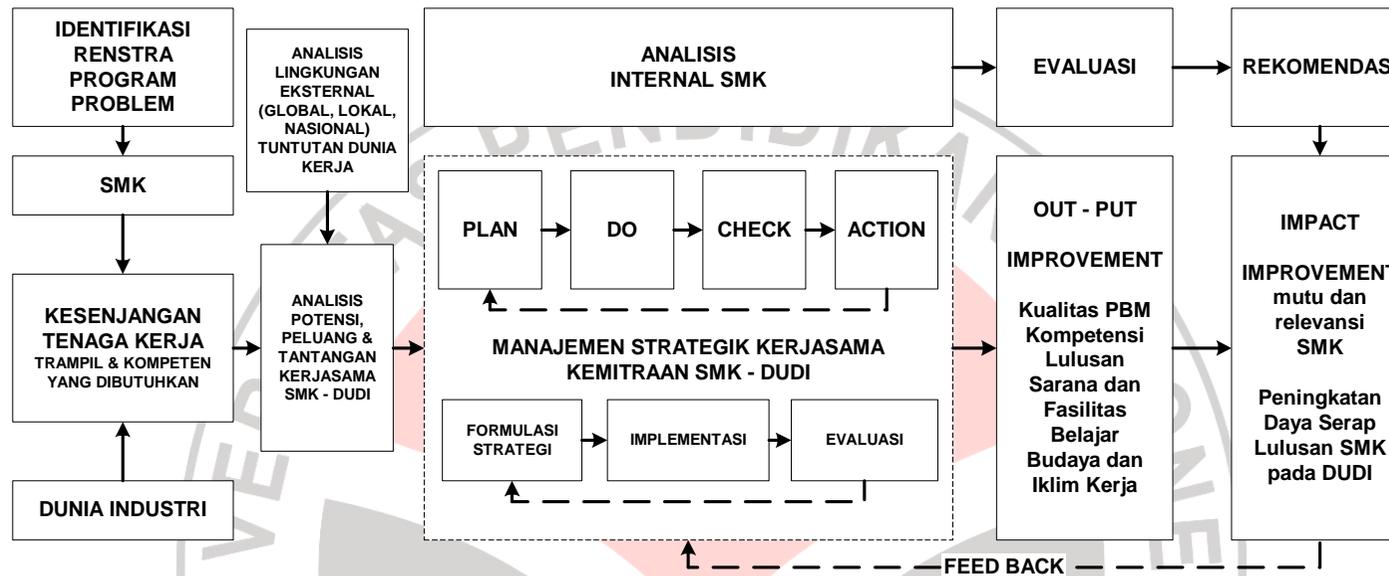
Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dapat ditempuh melalui beberapa cara diantaranya : (a) harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, untuk membangun sinergi dalam rangka merespon kebutuhan pasar yang dinamis, (b) peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta kesesuaian pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja. Kemitraan yang terjadi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri selama ini telah berjalan dengan baik. Hanya saja kemitraan tersebut masih belum sepenuhnya bisa melengkapi implementasi konsep penyelarasan pada sistem pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, penyusunan kurikulum, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi tidak dapat dilakukan sepihak oleh dunia pendidikan, namun memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti dapat menggambarkan suatu kerangka penelitian seperti terlihat dalam bagan dibawah ini. Peran stakeholder baik masyarakat secara umum, pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta atau dunia usaha memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pencapaian tujuan

pendidikan kejuruan, khususnya dalam meningkatkan mutu dan relevansi hasil pendidikan kejuruan.

Oleh karenanya pihak SMK harus mampu menyusun suatu strategi dan program pengembangan pendidikan yang bekerjasama dengan pihak industri maupun perguruan tinggi sebagai sasaran lulusan dalam bentuk kemitraan strategis. Dunia kerja dan perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam penyusunan dan perumusan kebijakan program pengembangan sekolah khususnya dalam penyusunan kurikulum sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan kebutuhan / pasar kerja, serta dinamika perubahan sosial masyarakat.

Manajemen strategi kerjasama kemitraan (*colaborative partnership*) sekolah menuntut alur berpikir yang jelas, sehingga langkah-langkah evaluasi kerjasama networking antara sekolah dan dunia kerja dapat diikuti dengan mudah. Alur berpikir ini dapat dituangkan dalam kerangka berpikir berdasarkan pendekatan sistem dengan harapan alur berpikir ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan tepat sasaran. Kerangka berpikir dalam Efektifitas Manajemen Strategik Kerjasama Kemitraan Sekolah Sebagai Basis Peningkatan Relevansi Pendidikan dengan Dunia Kerja pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Yogyakarta dapat digambarkan seperti diagram berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian tentang Implementasi Manajemen Stratejik Peningkatan Mutu SMK Berbasis Kemitraan (*colaboration partnership*) dengan Dunia Industri

Dari gambar kerangka pikir penelitian tersebut di atas dapat dipahami bahwa hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja yang masih belum dapat dipenuhi oleh sekolah kejuruan khususnya SMK dalam menghasilkan calon tenaga kerja yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi dunia kerja. Sebagai mana fakta di lapangan yang disampaikan Cunningham, Dawes and Bennet (2004) yang mengindikasikan keadaan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan berjalan dengan programnya sendiri, di sisi lain dunia kerja/industri dan asosiasi profesi sering mengeluh bahwa kualitas tenaga kerja (lulusan) belum memenuhi tuntutan keahlian (kompetensi) yang diharapkan. Gejala “*mismatch*” seperti ini pada akhirnya melahirkan lulusan “*underqualified*”, keadaan seperti ini cukup lama terjadi, bahkan sampai saat ini. Untuk itu kerjasama kemitraan antara SMK dan dunia kerja harus dibangun dengan kuat agar terdapat saling pengertian dan saling membantu khususnya dalam melakukan *share resources* yang dimiliki oleh masing-masing.

Kerjasama kemitraan yang dibangun antara SMK dan dunia kerja diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak khususnya SMK dalam mempersiapkan dan mengembangkan pembelajaran yang diharapkan oleh dunia kerja, dan dunia kerja mendapatkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang di tetapkan. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan dalam melakukan analisis kondisi tersebut baik pada sisi internal berupa kekuatan dan kelemahan sekolah kejuruan (SMK) maupun kondisi eksternal berupa peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh SMK dalam memperkecil kesenjangan tersebut. Disinilah letak peran dan fungsi manajemen strategik dalam melakukan analisis kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yang dilandasi oleh kemampuan leadership yang

kuat dalam melakukan analisis sehingga menghasilkan kebijakan berupa rumusan strategis yang dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan. Peran manajemen mutu dalam melakukan analisis khususnya dalam menilai setiap langkah manajerial baik selama perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*do*), evaluasi (*check*) hingga tindak lanjut (*act*) dan perbaikan yang diharapkan dapat berkesinambungan.

Dari hasil analisis kerjasama kemitraan tersebut diharapkan mendapat masukan dan hasil berupa perbaikan khususnya dalam kualitas PBM, kompetensi lulusan, sarana dan fasilitas belajar, budaya dan iklim kerja, yang pada akhirnya diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di SMK, sehingga kualitas dan daya serap lulusan SMK pada DUDI meningkat. Sebagai sebuah rekomendasi akhir dari penelitian ini diharapkan terdapat sebuah model konseptual yang dapat menjadi alternatif solusi dalam memecahkan masalah kebuntuan dan polemik yang terjadi antara dunia pendidikan kejuruan dan dunia kerja, yang mampu diimplementasikan bersama baik oleh SMK maupun dunia kerja.